

SKRIPSI

KARAKTERISTIK PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH PROVINSI RIAU BERDASARKAN TIPOLOGI KLASSEN

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau Pekanbaru*



Oleh :

LUKMANUL HAKIM

145111117

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

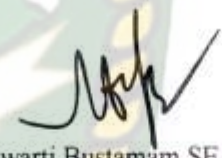
Nama : Lukmanul hakim
NPM : 145111117
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Pembangunan SI
PEMBIMBING I : Dra.Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si
PEMBIMBING II : Nawarti Bustamam,SE., M.Si
Judul Skripsi : KARAKTERISTIK PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
PROVINSI RIAU BERDASARKAN TIPOLOGI KLASSEN

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra.Hj.Ellyan Sastraningsih, M.Si

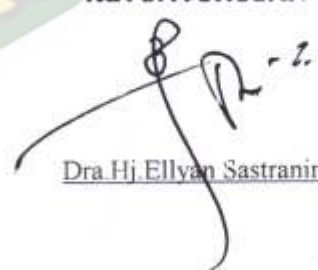

Nawarti Bustamam,SE.,M.Si

MENGETAHUI:

DEKAN

KETUA JURUSAN


Drs. Abdir, M.Si., Ak.,CA


Dra.Hj.Ellyan Sastraningsih, M.si

Characteristics of Regional Economic Development in Riau Province
Based on the Klassen Typology

by

Lukmanul Hakim *, Ellyan Sastraningsih **, Nawarti Bustamam **

Abstract

Regional development at the district / city or provincial level requires identification of achievement characteristics in subsequent development planning efforts. Therefore, this study aims to (1) find out the characteristics of the economic development sectors of Riau Province (2) find out the performance of the Development of 12 Regencies / Cities in Riau Province. To find out the characteristics of the economic sector in Riau Province, it was analyzed using the Klassen Typology technique which consisted of 4 (four) Quadrants namely Quadrant I, high income and high growth, Quadrant II high income but low growth, Quadrant III high growth but low income, and Quadrants IV low growth and low income. While to find out the development performance of 12 districts / cities in Riau Province obtained by using LQ (Location Quotient) analysis tools

Siak Regency, Bengkalis Regency and Rokan Hilir Regency are included in the category of depressed regions with high income but low growth. In contrast, Pekanbaru City, Kuantan Singingi Regency, Indragiri Hilir Regency, Indragiri Hulu Regency, Pelalawan Regency, and Rokan Hulu Regency are classified as developing regions with high growth but low income. Dumai City and Kampar Regency are included in the same quadrant, namely regions with low growth and low income.

LQ analysis shows the mining and quarrying sector to be the leading sector in Siak Regency, Bengkalis Regency, Rokan Hilir Regency, and Dumai City. Districts While Pekanbaru City relies more on the trade, hotel and restaurant sector, the manufacturing industry sector, and the fear and communication sector.

Keywords: Base, Sector, Characteristics, Development

Karakteristik Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau
Berdasarkan Tipologi Klassen

Oleh

Lukmanul Hakim*, Ellyan Sastraningsih **, Nawarti Bustamam **

Abstrak

Pembangunan daerah pada tingkat kabupaten/kota ataupun provinsi membutuhkan indentifikasi karakteristik capaian dalam upaya perencanaan pembangunan selanjutnya. Untuk itu penelitian ini bertujuan, (1) mengetahui karakteristik sektor-sektor pembangunan ekonomi Provinsi Riau (2) mengetahui kinerja Pembangunan 12 Kabupaten/kota di Provinsi Riau. Untuk mengetahui karakteristik sektor perekonomian di Provinsi Riau di analisis dengan menggunakan tehnik Tipologi Klassen yang terdiri dari dari 4 (empat) Kuadran yakni Kuadran I daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, Kuadran II daerah maju tapi tertekan, Kuadran III daerah berkembang cepat, dan Kuadran IV daerah yang relatif tertinggal. Sedangkan Untuk mengetahui kinerja pembangunan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau di peroleh dengan menggunakan alat analisis LQ (*Location Quotient*)

Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir termasuk masuk kategori daerah tertekan dengan pendapatan perkapita tinggi namun laju pertumbuhan rendah. Sebaliknya Kota Pekanbaru, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hulu tergolong daerah berkembang dengan pendapatan perkapita rendah namun laju pertumbuhan tinggi. Kota Dumai dan Kabupaten Kampar termasuk kedalam kuadran yang sama yaitu daerah dengan laju pertumbuhan yang rendah dan pendapatan perkapita rendah.

Analisis LQ menunjukan Sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor unggulan di Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Kabupaten Sedangkan Kota Pekanbaru lebih mengandalkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor pengakutan dan komunikasi.

Kata Kunci : Basis, Sektor, Karakteristik, Pembangunan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Karakteristik Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Tipologi Klassen"**. Shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu H. Ellyan Sastraningsih, M.Si dan Ibu Nawarti Bustamam, SE, M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, arahan dan motivasi sampai selesainya skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

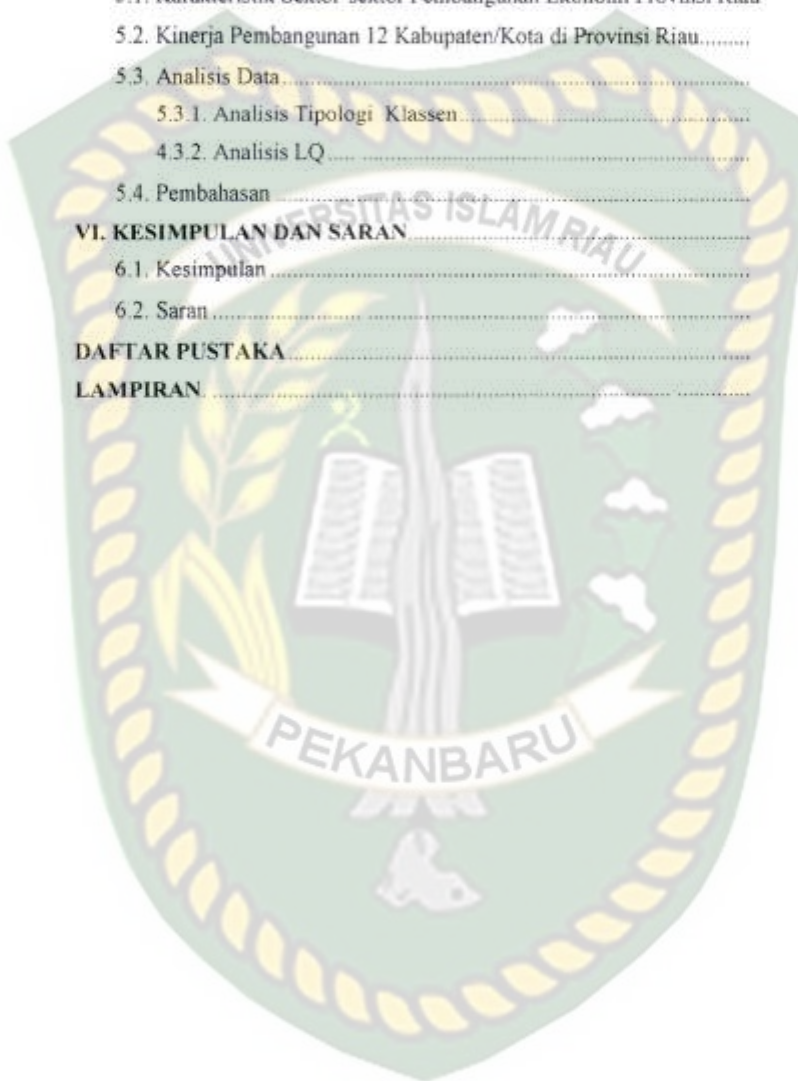
Pekanbaru, Agustus 2019

Lukmanul Hakim

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA	7
2.1. Tinjauan Pustaka.....	7
2.1.1. Konsep Pembangunan.....	7
2.1.2. Pembangunan Berkelanjutan.....	9
2.1.3. Teori Pertumbuhan.....	9
2.1.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	11
2.1.5. Analisis Tipologi Klassen.....	13
2.1.6. Pembangunan Ekonomi Daerah.....	16
2.1.7. Perubahan Struktur Ekonomi Daerah.....	18
2.2. Penelitian Terdahulu.....	23
2.3. Hipotesa.....	25
III. METODE PENELITIAN	26
3.1. Lokasi Penelitian.....	26
3.2. Populasi dan Sampel.....	26
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	26
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	27

3.5. Analisis Data	27
IV. GAMBARAN UMUM	30
4.1. Sejarah Singkat Provinsi Riau	30
4.2. Kondisi Geografis dan Demografi Provinsi Riau	35
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
5.1. Karakteristik Sektor-sektor Pembangunan Ekonomi Provinsi Riau	40
5.2. Kinerja Pembangunan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	44
5.3. Analisis Data	56
5.3.1. Analisis Tipologi Klassen	56
5.3.2. Analisis LQ	58
5.4. Pembahasan	59
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	60
6.1. Kesimpulan	60
6.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	64

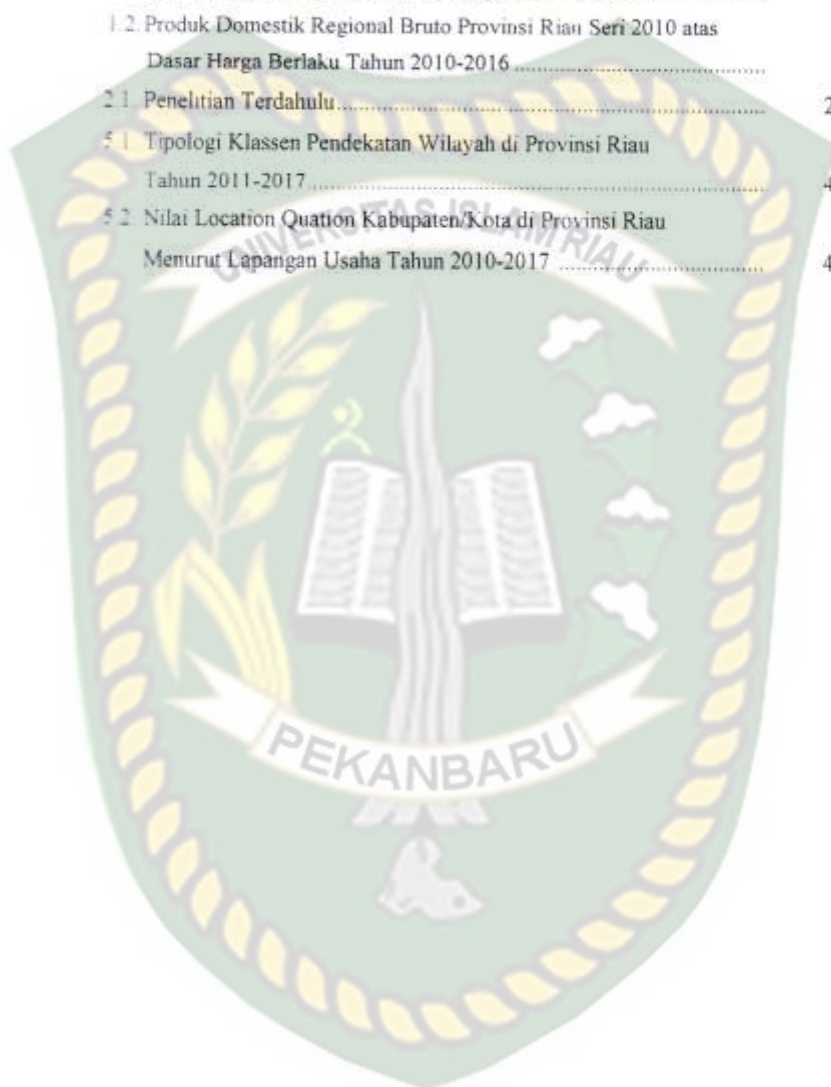


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Termasuk Minyak Bumi dan Gas.....	4
1.2. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2016.....	4
2.1. Penelitian Terdahulu.....	23
5.1. Tipologi Klassen Pendekatan Wilayah di Provinsi Riau Tahun 2011-2017.....	41
5.2. Nilai Location Quation Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2017.....	46

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Pendapatan Domestik Regional Bruto Berdasar Harga Berlaku Provinsi Riau Tahun 2010-2017.....	64
2 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2010-2017.....	65
3 Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2010-2017.....	66
4 Pendapatan Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010-2017.....	67
5 Pendapatan Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2010-2017.....	68
6 Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2013-2017.....	69
7 Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2013-2017.....	70
8 Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010-2017.....	71
9 Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2010-2017.....	72
10 Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010-2017.....	73
11 Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2010-2017.....	74
12 Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010-2017.....	75

13	Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2010-2017.....	76
14	Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Siak Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010-2017.....	77
15	Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Siak Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2010-2017.....	78
16	Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010-2017.....	79
17	Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2010-2016.....	80
18	Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010-2017.....	81
19	Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2010-2017.....	82
20	Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010-2017.....	83
21	Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2010-2017.....	84
22	Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010-2017.....	85
23	Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2010-2017.....	86
24	Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010-2017.....	87
24	Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2010-2017.....	88
25	Pendapatan Domestik Regional Bruto Kota Dumai Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010-2017.....	89

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

27	Pendapatan Domestik Regional Bruto Kota Dumai Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2010-2017	90
28	Klasifikasi Kabupaten/Kota Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2011-2017.....	91
29	PDRB Tahun 2017 atas Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota Provinsi Riau.....	92
30	Nilai LQ Kabupaten/Kota di Provinsi Riau menurut Lapangan Usaha Tahun 2017.....	93
31	Perhitungan LQ Kabupaten Kuantan Singingi.....	94
32	Nilai LQ 17 (Tujuh Belas) Sektor Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Paradigma baru pembangunan lebih menitikberatkan kepada pemerataan dan peran serta aktif masyarakat telah dimulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan Undang-Undang yang baru maka pembangunan akan lebih menitikberatkan kepada aspek desentralisasi. Dalam hubungannya dengan desentralisasi tersebut otonomi daerah menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat lokal. Secara harfiah otonomi daerah artinya hak wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Hampir seluruh urusan pemerintahan akan didesentralisasikan kepada daerah, kecuali yang menyangkut urusan keuangan negara, peradilan, hubungan luar negeri serta pertahanan dan keamanan. Dengan otonomi daerah maka wewenang pemerintah pusat menjadi berkurang dan perencanaan, pelaksanaan serta pembiayaan pembangunan diserahkan kepada Daerah (Kabupaten/Kota). Tugas pemerintah pusat akan lebih terbatas khususnya yang menyangkut kebijaksanaan dan penentuan norma-norma, penetapan standarisasi, penyusunan prosedur dan pengembangan *human capital*.

Kewenangan pemerintah daerah terutama dalam penggalian, pemanfaatan dan evaluasi pembiayaan pembangunan menuntut daerah untuk lebih mandiri dan lebih kreatif terutama dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya lainnya. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya melalui pendekatan kearifan lokal. Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak kepada kemampuannya untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai pemerintahan daerahnya. Sehingga kondisi yang ideal adalah bahwa ketergantungan kepada bantuan pusat haruslah seminimal mungkin dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian dari sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri. Indikator pembangunan memberikan gambaran tingkat pencapaian keberhasilan pelaksanaan program yang dilakukan. Keberhasilan berbagai program pembangunan sering diukur dari sudut pandang masing-masing *stake holder*, seperti lembaga legislatif, instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya. Idealnya, indikator keberhasilan dapat diukur dengan nilai-nilai atau informasi yang menggambarkan sejauh mana daerah mampu memanfaatkan potensi yang ada dan memberikan nilai tambah akibat dari keberhasilan memadukan potensi-potensi tersebut

Pembangunan diberbagai sektor yang telah berkembang selama ini secara langsung Maupun tidak langsung ikut melahirkan kemiskinan dan pengangguran

struktural baik di Perkotaan maupun di Perdesaan. Pemerintah daerah memiliki tantangan bagaimana mengintegrasikan pembangunan secara berimbang.

Secara umum pembangunan Provinsi Riau masih terkonsentrasi kepada pembangunan sektor primer. Hal ini terlihat dari nilai PDRB yang menunjukkan sebaran tidak merata antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Suatu daerah dapat dinyatakan maju apabila tidak terlalu bergantung kepada sektor pertanian sebagai sektor primer, namun mampu memanfaatkan sektor-sektor sekunder atau bahkan tersier dalam rangka peningkatan pembangunan daerah. Dari Tabel 1.1 Terlihat bahwa kontribusi sektor primer masih menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pembentukan nilai PDRB, bahkan sejak dari tahun 2010, persentase sumbangan sektor ini terus meningkat dari 15,25 % menjadi 22,94% pada tahun 2018.

Besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan pertumbuhan yang dilaksanakan di daerah. Semakin besar sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap PDRB suatu daerah maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke daerah yang lebih baik. Melihat seluruh kondisi diatas, maka sangat menarik untuk diteliti lebih jauh tentang perubahan kontribusi sektoral yang terjadi telah didasarkan kepada strategi kebijakan pembangunan yang tepat, yaitu strategi yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Lampiran 1.1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Termasuk Minyak Bumi dan Gas (Milyar Rupiah)

No	Kategori PDRB (Lapus)	PDRB ADHK Lapangan Usaha Tahunan (Milyar Rupiah)								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	91.152,8	94.307,4	97.911,0	102.216,7	108.498,1	108.969,0	113.287,6	119.270,3	124.483,6
2	Pertambangan dan Pengalihan	126.754,7	130.695,4	128.830,9	123.107,9	116.655,8	108.549,2	103.958,5	97.349,0	92.012,6
3	Industri Pengolahan	93.533,9	101.453,2	108.380,6	115.915,8	122.442,8	126.882,6	132.525,1	139.838,3	144.781,3
4	Pengadaan Listrik dan Gas	173,0	184,2	194,0	199,8	218,6	239,8	272,3	276,0	286,2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	58,9	59,7	60,2	60,6	61,2	62,7	62,4	65,4	65,2
6	Konstruksi	25.381,9	28.043,2	29.079,9	29.849,8	32.374,8	34.442,6	36.137,4	38.275,9	40.367,6
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29.211,1	31.394,8	34.840,6	36.789,2	38.245,9	38.816,7	40.709,3	43.302,3	46.102,2
8	Transportasi dan Pergudangan	2.608,1	2.793,3	3.105,9	3.316,0	3.581,0	3.773,6	3.889,2	4.057,7	4.190,4
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.451,9	1.588,0	1.752,6	1.856,5	1.985,9	2.023,3	2.087,4	2.179,2	2.281,0
10	Informasi dan Komunikasi	2.344,2	2.547,3	2.947,6	3.269,3	3.453,6	3.700,7	3.883,7	4.094,5	4.331,8
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.967,8	3.232,7	3.667,6	4.028,1	4.226,7	4.241,6	4.481,3	4.381,0	4.584,2
12	Real Estate	2.863,8	3.074,6	3.309,6	3.528,9	3.716,7	4.026,5	4.087,7	4.223,5	4.389,7
13	Jasa Perusahaan	14,7	15,9	17,7	19,3	21,8	23,5	24,1	26,0	28,2
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.537,5	7.091,7	7.532,4	7.762,8	7.881,5	8.227,9	8.203,4	8.282,8	8.364,1
15	Jasa Pendidikan	1.726,8	1.773,0	1.849,9	1.926,7	2.040,4	2.170,1	2.184,9	2.266,7	2.376,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	535,0	581,0	634,4	688,4	746,2	820,3	824,9	872,9	921,5
17	Jasa lainnya	1.262,3	1.380,4	1.511,3	1.651,8	1.835,7	2.021,8	2.150,3	2.320,3	2.521,5
	Jumlah	388.578,2	410.215,8	425.626,0	436.187,5	447.986,8	448.992,0	458.769,3	471.081,7	482.087,2

Sumber : BPS Provinsi Riau 2019

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2016 Tahun 2010-2018

Kabupaten/Kota	PDRB KabKota (Juta Rupiah)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kuantan Singingi	16.614.473,05	18.157.180,42	19.952.697,57	21.476.719,67	24.021.736,43	25.194.832,72	27.520.560,22
Indragiri Hulu	20.782.752,64	24.522.956,63	27.471.420,89	29.872.282,45	33.762.481,76	34.583.109,62	37.030.725,87
Indragiri Hilir	28.057.944,68	33.979.877,52	37.694.896,75	41.437.777,71	47.821.678,35	51.796.677,00	57.383.243,65
Pelalawan	23.797.161,13	26.920.834,59	29.013.693,83	31.018.734,42	35.401.165,31	38.176.433,57	41.165.592,46
Siak	52.420.353,85	67.446.587,39	79.303.427,52	82.129.724,43	85.735.522,14	77.235.451,69	78.943.381,95
Kampar	37.822.020,33	46.392.697,29	53.584.006,16	61.515.508,33	68.816.910,00	66.285.164,73	69.674.659,16
Rokan Hulu	15.930.239,18	18.092.917,87	19.966.871,41	21.645.415,45	25.355.416,52	27.159.524,22	29.449.285,41
Bengkalis	85.300.438,69	123.150.941,78	141.633.036,77	156.624.440,27	165.899.036,53	135.506.263,07	132.313.995,26
Rokan Hilir	39.964.267,01	49.757.232,31	58.953.747,42	65.200.092,05	74.545.552,92	70.692.968,31	73.459.605,60
Kepulauan Meranti	8.690.278,58	10.275.755,70	11.840.437,48	13.100.964,46	15.127.124,09	15.150.690,73	16.046.158,33
Pekanbaru	41.702.825,34	48.192.140,12	55.692.016,42	60.492.459,55	73.841.218,20	83.662.331,92	92.381.597,75
Dumai	17.495.472,48	18.406.420,81	18.956.363,45	21.231.766,16	23.628.466,85	25.430.569,61	27.945.396,02
RIAU	388.578.226,96	485.649.339,55	558.492.724,75	607.498.449,77	679.395.859,59	652.138.435,97	682.351.091,85

Sumber : BPS Provinsi Riau 2019

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian tersebut dengan judul “Karakteristik Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau berdasarkan Tipologi Klassen”.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas maka permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik sektor-sektor pembangunan ekonomi Provinsi Riau dengan Tipologi Klassen?
2. Bagaimana Kinerja Pembangunan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan Tipologi Klassen?

I.3. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan permasalahan dan latar belakang, kemudian dirumuskan beberapa tujuan seperti dibawah ini;

1. Untuk mengetahui karakteristik sektor-sektor pembangunan ekonomi Provinsi Riau dengan Tipologi Klassen.
2. Untuk mengetahui kinerja Pembangunan 12 Kabupaten/kota Di provinsi Riau dengan Tipologi Klassen.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian “Karakteristik Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen” diharapkan ini diharapkan akan menimbulkan manfaat bagi:

1. Untuk Pemerintahan Daerah dan Instansi Terkait dalam membuat Kebijakan Pembangunan dalam rangka Pembangunan daerah.
2. Untuk Akademik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menajdi referensi atau masukan bagi perkembangan dan menambah kajian ilmu ekonomi pembangunan utntuk mengetahui karakteristik pembangunan ekonomi daerah Provinsi Riau berdasarkan Tipologi Klassen.
3. Untuk Penelitian selanjutnya. Sebagai bahan tambahan referensi bagi peneliti lain yang mengambil topik penulisan yang sama di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

Pada Bab ini dicantumkan tentang teori-teori pendukung mengenai masalah yang terangkum dalam tujuan pustaka dan menggunakan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini menjelaskan metode penelitian yang berkaitan dengan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini beridixsn tentang gambaran umum yang berkaitan dengan daerah penelitian beserta keseluruhan aspek yang ada.

BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan penyajian hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang telah ditemukan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis sebagai sumbangan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Sedangkan menurut Anwar (2005), pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar (*basic need approach*), pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Definisi konsep pembangunan berkelanjutan diinterpretasikan oleh beberapa ahli secara berbeda-beda. Namun demikian pembangunan berkelanjutan sebenarnya didasarkan kepada kenyataan bahwa kebutuhan manusia terus meningkat. Kondisi yang demikian ini membutuhkan suatu strategi pemanfaatan sumberdaya alam yang efisien. Disamping itu perhatian dari konsep pembangunan yang berkelanjutan adalah adanya tanggungjawab moral untuk memberikan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang, sehingga

permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan adalah bagaimana memperlakukan alam dengan kapasitas yang terbatas namun akan tetap dapat mengalokasikan sumberdaya secara adil sepanjang waktu dan antar generasi untuk menjamin kesejahteraannya.

Penyusutan yang terjadi akibat pemanfaatan masa kini hendaknya disertai suatu bentuk usaha mengkompensasi yang dapat dilakukan dengan menggali kemampuan untuk mensubstitusi semaksimal mungkin sumberdaya yang langka dan terbatas tersebut sehingga pemanfaatan sumberdaya alam pada saat ini tidak mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang (*intergenerational equity*).

Definisi Pembangunan berkelanjutan menurut Bond *et al.* (2001) pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan dari kesepakatan multidimensional untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik untuk semua orang dimana pembangunan ekonomi, sosial dan proteksi lingkungan saling memperkuat dalam pembangunan. Bosshard (2000) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang harus mempertimbangkan lima prinsip kriteria yaitu: (1) abiotik lingkungan, (2) biotik lingkungan, (3) nilai-nilai budaya, (4) sosiologi, dan (5) ekonomi. Marten (2001) mendefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kecukupan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan tidak berarti berlanjutnya pertumbuhan ekonomi, karena tidak mungkin ekonomi tumbuh jika ia tergantung pada keterbatasan kapasitas sumberdaya alam yang ada.

2.1.2 Pembangunan Berkelanjutan

Sasaran ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan dan kecukupan kebutuhan ekonomi, kelestarian aset yaitu efisiensi dalam pembangunan sumberdaya dengan pengelolaan yang ramah lingkungan dan tetap memperhitungkan keadilan bagi masyarakat baik saat ini maupun generasi yang akan datang. Dalam hal ini pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar efisiensi dan pertumbuhan yang tinggi saja tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Pandangan ekologis didasarkan kepada pertimbangan bahwa perubahan lingkungan akan terjadi di waktu yang akan datang dan dipengaruhi oleh segala aktifitas manusia

2.1.3. Teori Pertumbuhan

Awalnya ekonomi di Eropa berpendapat bahwa transfer pertumbuhan antar wilayah umumnya berjalan lancar, sehingga perkembangan penduduk, produksi dan modal tidak selalu proporsional antar waktu. Namun pada kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, pertumbuhan ekonomi muncul atau terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki keuntungan lokasi. Beranjak dari hal tersebut, ahli Ekonomi Prancis Francois Perroux dalam Sjafrizal 2008 berpendapat "*Growth does not Growth*". Pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada daerah tertentu yang didukung oleh adanya keuntungan aglomerasi (*Agglomerasi Economies*) yang timbul akibat konsentrasi kegiatan ekonomi terkait. Pendapat perroux kemudian diperkuat oleh Hirschman (1958) yang menemukan adanya daerah dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan adapula daerah dengan pertumbuhan yang lambat.

Untuk melihat potensi ekonomi suatu daerah dapat di gunakan tiga pendekatan, yaitu *Metode Analisis share (SS) Location Qoutient (LQ)* dan *Klassen typology*. *Location quotients(LQ)* merupakan salah satu teknik perhitungan yang populer untuk mempelajari ekonomi daerah. Teknik ini membandingkan pangsa lokal dari industri tertentu dengan pangsa industri pada area yang lebih luas. LQ mengukur spesialisasi relatif dan konsentrasi suatu industri dalam ekonomi lokal dibandingkan dengan area yang lebih luas (biasanya nasional). Selain mampu membandingkan ekonomi lokal dengan ekonomi yang lebih besar, teknik ini juga tergolong sederhana dalam perhitungannya. Namun dibelakang itu, banyaknya asumsi yang digunakan mengakibatkan hasil pengolahan data sering kali bias, akibat dari kesalahan dalam penentuan asumsi-asumsi yang digunakan. Kehati-hatian dalam menginterpretasikan data mutlak diperlukan.

Analisis Shift Share merupakan alat analisis lain untuk mengukur perekonomian daerah dengan lebih fokus menjelaskan daya saing suatu daerah. Shift Share mampu mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi tenaga kerja di suatu wilayah pada dua periode waktu. Teknik analisis *Shift Share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan suatu variabel wilayah, seperti tenaga kerja, nilai tambah, pendapatan atau output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh pertumbuhan nasional, *industri mix*/bauran industri dan keunggulan kompetiti..

Dan pendekatan tipolgi klassen di gunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur ekonomi masing-masing daerah. Dengan menggunakan alat tipolgi klassen adalah dengan pendekatan wilayah/daerah seperti yang

digunakan dalam penelitian Syafrizal untuk mengetahui klasifikasi berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata (PDRB) perkapita sebagai sumbu horizontal.

2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurut Adam Smith, akumulasi modal sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Modal merangsang keterkaitan antara berbagai sektor pertumbuhan. Peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi penambahan modal, mendorong terciptanya penemuan dan pemanfaatan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat.

Pendapat Harrod-Domar tidak berbeda jauh dengan teori pertumbuhan Adam Smith, Harrod-Domar menganggap pertumbuhan bergantung kepada investasi/modal. Teori ini menganggap setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Rasio modal output (*COR*) sebagai suatu hubungan antara investasi yang ditanamkan dengan pendapatan tahunan yang dihasilkan dari investasi tersebut (Lincoln Arsyad, 1999 dalam Sulistiono 2006).

Proses pembangunan di daerah mempunyai perbedaan-perbedaan dengan pembangunan di tingkat nasional. Menurut Arsyad (1999) sangat sulit membedakan keduanya secara tepat, biasanya masyarakat lebih cenderung memisahkan antara keduanya dengan pembangunan daerah-daerah maju (perkotaan) dengan pembangunan daerah tertinggal (pedesaan). Namun secara sederhana faktor utama pembedanya hanya berdasar kepada cakupan luas geografis saja.

Pembangunan ekonomi daerah pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah meningkat dalam jangka panjang (Arsyad,1992 dalam Sulistiono 2003). Menurut Blakely 1989 dalam Nurbaya 1999, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Lapangan kerja diperlukan agar penduduk mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Agar lapangan kerja dapat tercipta, diperlukan persyaratan antara lain tersedianya lahan, modal, prasarana.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Dimana, kesemuanya ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang

kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad, 1999).

2.1.5 Analisis Tipologi Klassen

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Sirojuzilam (2010). Sadono Sukirno (1985:13) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Adisasmita Rahardjo (2005:28) pembangunan adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Dalam konteks pembangunan, menyatakan bahwa kebijaksanaan pemerintah ditujukan untuk mengubah cara berpikir, selalu memikirkan perlunya investasi pembangunan. Dengan adanya pembangunan akan terjadilah peningkatan nilai-nilai budaya bangsa, yaitu terciptanya taraf hidup yang lebih baik, saling menghargai sesamanya, serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang.

Adapun tujuan pembangunan menurut Sirojuzilam (2010), ada dua tahap. Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan

kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi harus berjalan secara beriringan dan terencana, hal ini mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan dengan lebih merata. Pertumbuhan merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan ekonomi akan dapat pula dinikmati masyarakat sampai di lapisan paling bawah, baik dengan sendirinya maupun karena campur tangan pemerintah. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konsumen secara berkala.

Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan pertumbuhan. Sirojuzilam (2008:18) mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang kepada penduduknya, kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Sedangkan menurut Tarigan (2005), pertumbuhan

ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, menurut Adisasmita Raharjo (2005) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya.

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah Provinsi Riau. Analisis Tipologi Klassen digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi sektor perekonomian Provinsi Riau dengan memperhatikan sektor perekonomian Provinsi Riau sebagai daerah referensi.

Analisis Tipologi Klassen menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut (Sjafrizal, 2008:180):

1. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (*developed sector*) (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s) dan memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan $si > s$ dan $ski > sk$.
2. Sektor maju tapi tertekan (*stagnant sector*) (Kuadran II). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s), tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih besar dibandingkan kontribusi

sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk).
Klasifikasi ini dilambangkan dengan $si < s$ dan $ski > sk$.

3. Sektor potensial atau masih dapat berkembang (*developing sector*) (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s), tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan $si > s$ dan $ski < sk$.

4. Sektor relatif tertinggal (*underdeveloped sector*) (Kuadran IV).
Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s) dan sekaligus memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan $si < s$ dan $ski < sk$.

2.1.6 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut,

Namun menurut kuncoro dalam Safi'i (2007 :61), Proses pembangunan daerah pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar di tujukan pada prestasi pertumbuhan ekonomi yang di capai oleh suatu Negara/daerah, namun yang lebih luas dari pada itu pembangunan memiliki perspektif yang luas terutama perubahan sosial. Dimensi sosial yang sering terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat strategis bagi proses pembangunan. Dalam proses pembangunan selain mempertimbangkan pertumbuhan dan pemerataan, juga dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses pembangunan di lakukan upaya yang di lakukan bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian daerah ke arah yang lebih baik.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan-penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya buatan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Khusaini, 2006).

Menurut Krisnamurti dalam saifan (2001) mengatakan pembangunan ekonomi yang berhasil harus memiliki empat dimensi pokok, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, perubahan atau transformasi struktur ekonomi dan kesinambungan pembangunan itu sendiri.

Namun fatah dalam Safe'i (2007:80) mengatakan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan ideal nya harus di tentukan berdasarkan dimensi pembanguna, yakni tergantung pada focus dan orientasi pembangunan mana yang

di laksanakan dan dimensi mana yang lebih menjadi perhatian bersama baik *decision maker* dan para *planner* sebagai perencanaan dan perancang, para pelaksana pembangunan itu sebagai pihak yang mejalankan atau sering di sebut juga sebagai agen pembangunan, maupun masyarakat pada umumnya sebagai sasaran pembangunan. Dimensi yang mejadi perhatian ini kemudian di berikan Indikator-indikator dari berbagai dimensi pembangunan inilah yang kemudian menjadi tolak ukur atau ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

2.1.7 Perubahan Struktur Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkesinambungan dalam suatu kurun waktu tertentu dapat mengubah struktur ekonomi. Keadaan ekonomi di negara manapun umumnya mengalami pertumbuhan baik secara alamiah maupun pengaruh dari kebijakan ekonomi. Perubahan struktur (transformasi struktural) perekonomian suatu daerah adalah perubahan dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Ini berarti juga terjadi perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri kemudian dari sektor industri berubah ke sektor jasa-jasa (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. Angka Produk Domestik Regional Bruto sangat dibutuhkan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Penyajian PDRB terdapat dua cara, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), artinya semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, sehingga perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. Atau dengan kata lain PDRB atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap (harga pada tahun dasar) yang digunakan selama satu tahun. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan (pengeluaran) yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat (keseluruhan) maupun sektor. Selain itu juga bermanfaat untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah berdasarkan distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap nilai total PDRB. Selain itu, pendapatan per kapita yang diperoleh dari perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya.

Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat inflasi atau deflasi yang terjadi. Menurut Widodo (2006), untuk menghitung PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Pendekatan produksi, maksudnya PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai

tambah merupakan hasil pengurangan output dengan input antara. Unit unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor), yaitu : 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Listrik, Gas dan Air Bersih, 5. Bangunan, 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran, 7. Pengangkutan dan Komunikasi, 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

- b. Pendekatan pendapatan, maksudnya PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewiraswataan), semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.
- c. Pendekatan Pengeluaran, maksudnya PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan stok, dan (5) ekspor netto (ekspor dikurangi impor).

Badan Pusat Statistik (2012) menyebutkan bahwa PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomi sesuai dengan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

- a) Subsektor Tanaman bahan makanan
 - b) Subsektor Tanaman perkebunan
 - c) Subsektor Peternakan
 - d) Subsektor Kehutanan
 - e) Subsektor Perikanan
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
- a) Subsektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 - b) Subsektor Pertambangan Bukan Migas
 - c) Subsektor Penggalian
3. Sektor Industri Pengolahan
- a) Subsektor Industri Migas
 - Pengilangan Minyak Bumi
 - Gas Alam Cair (LNG)
 - b) Subsektor Industri Bukan Migas
 - Makanan, Minuman dan Tembakau
 - Tekstil, Barang dari kulit dan Alas kaki
 - Barang kayu dan Produk lainnya
 - Produk Pupuk, Kimia dan karet
 - Produk Semen dan Penggalian bukan logam
 - Logam Dasar Besi dan Baja
 - Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Transportasi
 - Produk Industri dan Pengolahan lainnya
4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
- a) Subsektor Listrik

- b) Subsektor Gas
- c) Subsektor Air Bersih
- 5. Sektor Konstruksi
- 6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
 - a) Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran
 - b) Subsektor Hotel
 - c) Subsektor Restoran
- 7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
 - a) Subsektor Pengangkutan
 - Angkutan Rel
 - Angkutan Jalan Raya
 - Angkutan Laut
 - Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Angkutan Udara
 - Jasa Penunjang Angkutan
 - b) Subsektor Komunikasi
- 8. Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
 - a) Subsektor Bank
 - b) Subsektor Jasa Penunjang Keuangan
 - c) Subsektor Real Estate
 - d) Subsektor Jasa Perusahaan
- 9. Jasa-Jasa
 - a) Subsektor Pemerintahan Umum
 - Administrasi Pemerintah dan Pertahanan
 - Jasa Pemerintah Lainnya

b) Subsektor Swasta

- Jasa Sosial Kemasyarakatan

- Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik yang hampir sama, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tahun	Judul	Ringkasan
1	Chumaidatul Miroah	2015	Analisis Penentuan Sektor Unggulan Kota Semarang melalui Pendekatan Tipologi Klassen	Tujuan penelitian untuk mengetahui sektor apa saja yang berpotensi dan menjadi sektor unggulan dan bagaimana kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian Kota Semarang. Analisis wilayah/daerah seperti digunakan dalam penelitian Syafrizal untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa klasifikasi sektor PDRB yang ada di Kota Semarang selama 5(Lima) Tahun (2009-2013) sebagai berikut (1)Komoditas Unggul (Kuadran I) berdasarkan analisis tipologi klassen adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, komoditas potensi (Kuadran II) sektor Industri Pengolahan, listrik, Gas, dan air bersih, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa, komoditas terhambat (Kuadran III) sektor bangunan, pertambangan dan

No	Nama	Tahun	Judul	Ringkasan
				penggalan, komoditas tertinggal (Kuadran IV) sektor pertanian
2	Dini Sapta Wulan Fatmasari	2007	Potensi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tangerang (Pendekatan Model Basis Ekonomi)	Variabel yang digunakan PDRB pertumbuhan sektor ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor ekonomi komponen <i>share</i> , komponen net shift, komponen deferential shift, komponen propotional shift. Analisis yang digunakan LQ dan shift share. Hasil analisis ini yaitu sektor basis di kota tanggerang adalah industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor angkutan dan komunikasi
3	Rizal Endi, I Wayan Suparta, Muhammad Husaini	2015	Analisis Sektor Unggulan dan pengembangan wilayah di kota Bandar Lampung 2000-2012.	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dalam struktur perekonomian kota Bandar Lampung sebagai kota informasi dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dan strategi pengembangan wilayah. Penelitian ini menggunakan data <i>time series</i> PDRB Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung tahun 2000-2012. Alat analisis yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis <i>Klassen typology</i> , analisis <i>Location Quetient (LQ)</i> dan analisis <i>Shift Share</i> . Hasil penelitian untuk menentukan suatu sektor unggulan adalah sektor yang maju dan tumbuh pesat, basis dan kompetitif maka sektor/sub sektor/sub sub ekonomi yang masuk dalam katagori sektor ekonomi yaitu, Sektor Industri pengolahan (2) sektor keuangan, <i>realstate</i> , dan jasa perusahaan. Subsektor ekonomi yaitu industri bukan migas. Sub- sektor ekonomi yaitu (1) barang kayu dan hasil hutan lainnya, (2) Semen dan

No	Nama	Tahun	Judul	Ringkasan
				barang galian bukan Loga, (3) logam dasar besi dan baja(4) angkutan laut, dan (5) jasa pemerintah lainnya
4	Mutiara Ekasari	2011	Perencanaan Pengembangan Sektor Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Kabupaten Temanggung	Variabel yang digunakan sektor ketela pohon yang dapat di Kecamatan kaloran. Temanggung, Selompang, dan pringsurat. Analisis yang di gunakan yaitu LQ, Shift Share, Tipologi Klassen, Skalogram dan Overlay. Hasil dari analisis Mutiara bahwa sektor padi terdapat di Kecamatan Kedu, Temanggung, Kledung, Tlogomulyo dan Tembarak. Sektor jagung terdapat di kecamatan Tlogomulyo, Tembarak dan Kranggan

2.3 Hipotesa

Berdasarkan konsep yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut:

1. Diduga karakteristik sektor pembangunan di Provinsi Riau terbagi atas 4 kategori yaitu (1) sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (*developed sector*), (2) Sektor maju tapi tertekan (*stagnant sector*), (3) Sektor potensial atau masih dapat berkembang (*developing sector*), (4) Sektor relatif tertinggal (*underdeveloped sector*).
2. Diduga kinerja pembangunan 12 Kabupaten Kota di Provinsi Riau terbagi atas 4 kategori yaitu (1) Daerah yang maju dan tumbuh dengan pesat (*developed Area*), (2) daerah maju tapi tertekan (*stagnant area*). (3) Daerah potensial atau masih dapat berkembang (*developing area*) (4) Area relatif tertinggal (*underdeveloped Area*).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Menurut Usman (2009), penetapan lokasi penelitian di maksudkan untuk membatasi daerah dari variabel-variabel yang di teliti. Penelitian di laksanakan di Provinsi Riau yang meliputi 12 Kabupaten. Pemilihan lokasi ini di karenakan tinggi nya tingkat pertumbuhan ekonomi 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

3.2. Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2006) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dan penelitian ini adalah 12 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Riau yaitu: Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hili, Pelelawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai. Dengan tekhnik pengambilan sampel secara sensus yaitu seluruh populasi di jadikan sampel

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan bersumber dari :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau meliputi
 - a. PDRB Provinsi Riau Periode 2013-2018
 - b. Laju pertumbuhan Ekonomi 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau tahun 2013-2018
2. Badan Pusat Statistik (BPS) 12 Kabupaten/kota se Provinsi Riau

- a. PDRB 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau tahun 2013-2018
- b. Laju Pertumbuhan ekonomi 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau tahun 2013-2018

Menurut Sugiono (2010) data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data/ di peroleh dari tangan ke dua seperti dari hasil penelitian orang lain, tulisan dari media cetak, bebagai buku, dokumentasi, dan catatan pribadi yang ada hubungannya dengan fokus penelitian

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dokumentasi, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpul data dari berbagai sumber yaitu instansi- instansi yang berhubungan dengan penelitian dan melakukan dengan pengumpulan data dengan buku-buku ataupun dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Badan Pusat Statistik 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

3.5 Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif untuk menganalisis data. Metode deskriptif yaitu suatu metode yang membahas permasalahan dengan menguraikan dan menjelaskan sehingga gambaran yang menjelaskan yang sebenarnya, kemudian di kaitkan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut. Teknik analisa yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik sektor perekonomian di Provinsi Riau di

analisis dengan menggunakan teknik *Typologi Klassen* (aswansdi dan mudrajat kuncoro , 2002). Kriteria yang di gunakan terdiri dari empat: Kuadran I yakni daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high income and high growth*). Kuadran II yakni daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*). Kuadran III yakni daerah berkembang cepat (*high growth but low income*). Kuadran IV adalah daerah yang relatif tertinggal (*low growth and low income*).

2. Untuk mengetahui kinerja pembangunan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau di peroleh dengan menggunakan alat analisis LQ. LQ adalah suatu alat metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (kabupaten/kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala Provinsi atau Nasional. Teknik ini untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan untuk melihat kemampuan daya saing komoditi antar daerah atau dengan kata lain teknik ini membantu kita untuk melihat sektor unggulan pada suatu wilayah. Koefisien ini di definisikan dengan rumusan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{VA_k^i / \sum VA_k}{VA_p^t / \sum VA_p}$$

Dimana :

LQ = Koefisien *location quotient*

VA_k^i = Value Added (Nilai Tambah) Sektor I ditingkat Kabupaten/Kota

$\sum VA_k$ = Total Value Added (PDRB) ditingkat Kabupaten/Kota

VA'_p = Value Added (Nilai Tambah) Sektor I ditingkat Provinsi

$\sum VA_p$ = Total Value Added (PDRB) ditingkat Provinsi

Nilai koefisien *Location Quotient* adalah antara 0 (nol) dan tak terhingga

Kriteria penggolongannya adalah sebagai berikut: jika $LQ > 1$, hal itu menunjukkan bahwa sektor yang ada di daerah tersebut merupakan sektor basis dan mampu mengekspor hasil industrinya untuk daerah lain. Jika $LQ < 1$, Hal itu menunjukkan bahwa sektor yang ada di daerah tersebut bukan merupakan sektor basis dan cenderung mengimpor untuk daerah lain. Jika $LQ = 1$, hal itu menunjukkan bahwa produk domestik yang di miliki daerah tersebut habis dikonsumsi oleh daerah tersebut.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat Provinsi Riau

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-Undang No. 61 Tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952-5 Maret 1958).

a. Periode 5 Maret 1958- 6 Januari 1960

Dalam Undang-Undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No. 75 tahun 1957, daerah swatantra tingkat II, yaitu : Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau, termasuk dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No. 25) dan Kotaparaja Pekanbaru, termaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1956.

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provisi Riau di lakukan tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang olen Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh sekjen MR. Mumarman. Pelantikan tersebut dilakukan di tengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatera Tengah yang dilibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikiann pemerintah daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

Di Riau daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Indragiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial kantor gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor gubernur Tanjung Pinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.

b. Pemindahan Ibukota

Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai dipikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjung Pinang sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri

Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6. Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka badan penasehat meminta kepada gubernur supaya membentuk suatu panitia khusus. Dengan surat keputusan gubernur kepala daerah swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.21/O/3-D/58 dibentuk panitia penyelidik penetapan ibukota daerah swatantra tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa perang Riau daratan dan penguasa perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapat ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.

c. Periode 6 Januari 1960-15 Nopember 1966

Dengan dilantiknnya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai gubernur, maka struktur pemerintahan daerah tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan. Badan penasehat gubernur kepala daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi Ibu Kota.

Aparatur pemerintahan daerah, sesuai dengan Penpres No.6 tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-IO telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari : 1) Wan Ghalib, 2) Soeman Hs dan 3) A. Muin Sadjoko.

Anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian (BPH) merupakan pembantu gubernur kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staff Residen Mr. Sis disusunlah kerja pemerintah daerah, yang dititik beratkan pada :

- 1) Pemulihan perhubungan lalu: lintas untuk kemakmuran rakyat.
- 2) Menggali sumber-sumber penghasilan daerah.
- 3) Menyempurnakan aparatur.

Untuk penyempurnaan pemerintahan daerah, disusunlah DPRD-GR. Untuk itu ditugaskan anggota BPH Wan Ghalib dengan dibentuk Bupati Dt. Mangkuto Ameh yang mengadakan hearing dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa dalam menyusun komposisi. Sesusai dengan itu

diajukan sebanyak 38 calon yang disampaikan kepada menteri dalam negeri Ipi Gandamana.

Usaha untuk menyempurnakan pemerintahan daerah terus ditingkatkan, disamping gubernur kepala daerah. Pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang wakil gubernur kepala daerah, yaitu Dt. Wan. Abdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan Walikota dipegang oleh Tengku Bay.

Di samping penyempurnaan aparatur pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah kabupaten yang ada batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan Bagan Siapi-api dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten. Untuk itu maka oleh pemerintahan daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK No.61S tahun 1962 di bentuklah suatu panitia. Hasil kerja dari panitia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) buah daerah tingkat II (dua) dan I (satu) buah Kotamadya.

- 1) Kotamadya Pekanbaru : Walikota KDH Kotamadya Tengku Bay.
- 2) Kabupaten Kampar : Bupati KDH R. Subrantas.
- 3) Kahupalen Indragiri : Bupati KDH. H. Masnoer.
- 4) Kabupaten Indragiri Hilir : Bupati KDH Drs. Baharudin Yusuf.
- 5) Kabupaten Kepulauan Riau : Bupati KDIT Adnan Kasim.
- 6) Kabupaten Bengkalis : Bupati KDH H. Zalik aris.

d. Paska Reformasi

Seiring dengan berhembusnya “Angin Reformasi” telah memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi menjadi ke-32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 kabupaten/Kota sekarang hanya menjadi 12 Kabupaten/Kota. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah:

- 1) Kuantan Singingi
- 2) Indragiri Hulu
- 3) Indragiri Hilir
- 4) Pelalawan
- 5) Siak Siak Indrapura
- 6) Kampar
- 7) Rokan Hulu
- 8) Bengkalis
- 9) Rokan Hilir
- 10) Pekanbaru
- 11) Dumai
- 12) Meranti

4.2 Kondisi Geografis dan Demografi Provinsi Riau

Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas \pm 8.915.016 Ha, (89.150 km²), keberadaannya membentang lereng bukit barisan sampai selat Malaka terletak antara 01° 05' 00" Lintang Utara atau antara 100°00' – 105° 05' 00" Bujur Timur. Didaratan terdapat 15 sungai, diantaranya ada 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana penghubung seperti sungai Siak dengan panjang 300 Km dan kedalaman 8-12 Meter, Sungai Rokan sepanjang 400 Km dan kedalaman 6-8 meter, Sungai Kampar dengan panjang 400 Km dan kedalaman \pm 6 meter, dan Sungai Indragiri sepanjang 500 Km dengan kedalaman 6-8 meter. Keempat sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut Laut.

Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan Negara tetangga dan Provinsi lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat,
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka,
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

Sedangkan batas –batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi bila di lihat posisinya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Selatan : Provinsi Jambi

Sebelah Barat : Kabupaten Kuantan Singingi

Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hulu

2. Kabupaten Indragiri Hulu.

Adapun batas-batas Kabupaten Indragiri Hulu bila dilihat posisinya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan

Sebelah Selatan : Provinsi Jambi

Sebelah Barat : Kabupaten Kuantan Singingi

Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hilir

3. Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun batas-batas Kabupaten Indragiri Hilir bila di lihat posisinya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan

Sebelah Selatan : Provinsi Jambi

Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hulu

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau

4. Kabupaten Pelalawan.

Adapun batas-batas Kabupaten Pelalawan bila di lihat dari posisinya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hilir
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau

5. Kabupaten Siak.

Adapun batas-batas Kabupaten Siak bila di lihat posisinya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- Sebelah Barat : Kota Pekanbaru
- Sebelah Timur : Kabupaten Kepulauan Meranti

6. Kabupaten Kampar

Adapun batas-batas Kabupaten Kampar bila di lihat posisinya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Pekanbaru dan kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat
- Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak

7. Kabupaten Rokan Hulu

Adapun batas-batas Kabupaten Rpkn Hulu bila di lihat posisinya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatra Utara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar

Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Barat

Sebelah Timur : Kabupaten kampar

8. Kabupaten Bengkalis

Adapun batas-batas Kabupaten Bengkalis bila di lihat posisinya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selat Malaka

Sebelah Selatan : Kabupaten Siak

Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai

Sebelah Timur : Provinsi kepualaua Riau

9. Kabupaten Rokan Hilir

Adapun batas-batas Kabupaten Rokan Hilir bila di lihat posisinya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Provinsi Sumatra Utara dan Selat Malaka

Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis

Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Utara

Sebelah Timur : Kota Dumai

10. Kabupaten Kepulauan Meranti

Adapun batas-batas Kabupaten Kepulauan Meranti bila di lihat posisinya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selat Malaka dan kabupaten Bengkalis

Sebelah Selatan : Kabupaten Siak

Sebelah Barat : Kabupaten Siak

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau

11. Kota Pekanbaru

Adapun batas-batas Kota Pekanbaru bila di lihat posisinya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan

12. Kota Dumai

Adapun batas-batas Kota Dumai bila di lihat posisinya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir
- Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis

Hasil sensus penduduk Provinsi Riau pada bulan Mei 2010. Jumlah penduduk Provinsi Riau menurut hasil olah cepat sebesar 5.543.031 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki 2.854.989 jiwa dan perempuan 2.688.042 jiwa. Sensus Penduduk (SP) dilaksanakan 10 tahun sekali. Berdasarkan data yang dupublikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Tahun 2018, jumlah penduduk Riau tahun 2018 berjumlah 6.717.612 jiwa.

Distribusi penduduk 2018 menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa penduduk Riau terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi dengan jumlah penduduk 1.101.706 jiwa atau sekitar 16,40 persen dari seluruh penduduk Riau. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 185.750 jiwa atau 2,77 persen.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Sektor-Sektor Pembangunan Ekonomi Provinsi Riau

Analisis Sektor-Sektor Pembangunan Ekonomi Provinsi Riau dilakukan dengan Tipologi Klassen dengan memanfaatkan data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2010-2017, Jumlah Penduduk Tahun 2010-2017, dan Pendapatan perkapita Tahun 2010-2017 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang terdiri dari Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru dan Dumai. Sebagai acuan, digunakan jenis data yang sama untuk Provinsi Riau, yang secara rinci dijelaskan pada lampiran 1 sampai dengan lampiran 27. Pendapatan Perkapita diperoleh dengan membandingkan Nilai PDRB dengan jumlah penduduk, sedangkan laju pertumbuhan digunakan data PDRB tahun t dan $t-1$.

Hasil analisis membagi Kabupaten/Kota kedalam 4 (empat) kuadran , yaitu: Kuadran I yakni daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high income and high growth*). Kuadran II yakni daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*). Kuadran III yakni daerah berkembang cepat (*high growth but low income*). Kuadran IV adalah daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini dan secara terinci dijelaskan pada lampiran 28:

Tabel 5.1 Tipologi Klassen Pendekatan Wilayah di Provinsi Riau Tahun 2011-2017

	Pendapatan per Kapita Rendah	Pendapatan per Kapita Tinggi
2011		
Laju Pertumbuhan Tinggi	Kuadran III	Kuadran I
	Pekanbaru, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, Rokan Hulu	
Laju Pertumbuhan Rendah	Kuadran IV	Kuadran II
	Dumai, Kampar	Siak, Bengkalis, Rokan Hilir
2012		
Laju Pertumbuhan Tinggi	Kuadran III	Kuadran I
	Pekanbaru, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Dumai	
Laju Pertumbuhan Rendah	Kuadran IV	Kuadran II
	Kampar	Siak, Bengkalis, Rokan Hilir
2013		
Laju Pertumbuhan Tinggi	Kuadran III	Kuadran I
	Pekanbaru, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, Rokan Hulu	
Laju Pertumbuhan Rendah	Kuadran IV	Kuadran II
	Kampar, Dumai	Siak, Bengkalis, Rokan Hilir
2014		
Laju Pertumbuhan Tinggi	Kuadran III	Kuadran I
	Pekanbaru, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Kampar	
Laju Pertumbuhan Rendah	Kuadran IV	Kuadran II
	Dumai, Kepulauan Meranti	Siak, Bengkalis, Rokan Hilir
2015		
Laju Pertumbuhan Tinggi	Kuadran III	Kuadran I
	Pekanbaru, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Dumai	Bengkalis
Laju Pertumbuhan Rendah	Kuadran IV	Kuadran II
	Kampar, Kepulauan Meranti	Siak, Rokan Hilir
2016		
Laju Pertumbuhan Tinggi	Kuadran III	Kuadran I
	Pekanbaru, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, Rokan Hulu	
Laju Pertumbuhan Rendah	Kuadran IV	Kuadran II
	Dumai, Kampar	Siak, Bengkalis, Rokan Hilir
2017		
Laju Pertumbuhan Tinggi	Kuadran III	Kuadran I
	Pekanbaru, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, Rokan Hulu	
Laju Pertumbuhan Rendah	Kuadran IV	Kuadran II
	Dumai, Kampar	Siak, Bengkalis, Rokan Hilir

Sumber : Data Olahan PDRB Provinsi Riau Tahun 2011-2017

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa kondisi pertumbuhan daerah berbeda dari tahun ke tahun. Kabupaten Bengkalis termasuk kabupaten yang mampu mencapai daerah dengan pendapatan perkapita tinggi namun laju pertumbuhan rendah pada tahun 2017. Kondisi ini relatif sama dengan kondisi tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 sehingga Kabupateb Bengkalis berada pada yang relatif tertekan karena tidak mampu tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan rata Provinsi meskipun mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi. Kabupaten Bengkalis menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang relatif stabil pada posisi ini. Bengkalis didukung oleh sektor pertambangan terutama minyak bumi sebagai motor penggerak utama perekonomiannya sehingga mampu mencapai pendapatan Perkapita yang lebih tinggi dari Provinsi Riau.

Hal yang relatif sama terjadi pada Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir yang sejak 2011 sudah berada pada daerah maju tapi tertekan karena penduduknya mempunyai pertumbuhan pendapatan per kapita yang tinggi tetapi tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonominya. Kedua kabupaten ini juga menumpukan pertumbuhan ekonominya pada sektor pertambangan subsektor minyak bumi dan gas.

Berkaca pada tiga kabupaten, Bengkalis, Siak, dan Rokan Hilir, sektor pertambangan terutama migas masih menjadi sektor unggulan pendorong pertumbuhan. Penerimaan yang diperoleh dari sektor migas dalam bentuk dana bagi hasil sumber daya alam migas menjadikan daerah-daerah ini menjadi daerah yang kaya. Masalahnya adalah apakah pemerintah daerah memanfaatkan dana tersebut untuk mendorong sektor-sektor produktif atau tidak, misal penyediaan

sarana infrastruktur jalan, listrik, dan sebagainya. Sehingga daerah ini tidak terlalu tergantung lagi pada penerimaan migas di masa datang karena minyak bumi adalah sumber daya alam ini bisa habis dan tidak bisa diperbarui.

Selama periode 2011-2017, terdapat 6 kabupaten/kota yang berada pada kuadran pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi pertumbuhan pendapatan per kapita masih lebih rendah dari Provinsi termasuk daerah yang berkembang. Kabupaten/kota tersebut adalah Pekanbaru, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, Rokan Hulu. Pekanbaru mengandalkan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini menjadi tujuan penduduk sekitar untuk mencari penghasilan yang lebih tinggi. Tetapi sebagian besar dari mereka berada di sektor informal yang belum mampu memberikan pendapatan yang tinggi pada sebagian besar penduduknya. Pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, dan sebagian besarnya masih menerima pendapatan yang rendah.

Sedangkan Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Rokan Hulu semuanya mengandalkan sektor pertanian. Tingginya pertumbuhan yang ditopang sektor pertanian ternyata belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Harga jual produk pertanian tidak stabil. Saat panen melimpah harga jual produk cenderung mengalami penurunan. Subsektor perkebunan terutama kelapa sawit menjadi andalan di Kabupaten Kuantan

Indragiri Hilir, dan Rokan Hulu. Sedangkan subsektor kehutanan menjadi pendorong pertumbuhan di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu.

Kabupaten Kampar dan Kota Dumai selama 2010-2017 mengalami pergeseran kuadran dari daerah berkembang ke daerah relatif tertinggal atau sebaliknya dengan pertumbuhan pendapatan per kapita rendah, pertumbuhan ekonomi bergeser dari pertumbuhan ekonomi rendah ke pertumbuhan ekonomi tinggi dan sebaliknya. Kabupaten Kampar sebenarnya mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian, terutama penggalian sebagai sektor andalan. Mayoritas penggalian yang ada adalah galian C. Dan ternyata sektor ini belum mampu memberikan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat pada khususnya dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya.

5.2 Kinerja Pembangunan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi,

Untuk melihat kinerja pembangunan yang dimiliki oleh kabupaten/kota di Propinsi Riau dapat dilakukan dengan analisis Location Quotient (LQ). LQ adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (kabupaten/kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. Teknik ini untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan untuk melihat kemampuan daya saing komoditi antar daerah atau dengan kata lain teknik ini membantu kita untuk melihat sektor unggulan pada suatu wilayah.

Tabel 5.2 menjelaskan klasifikasi sektor basis atau non basis pada masing-masing kabupaten kota di Provinsi Riau. Penentuan klasifikasi tersebut diperoleh dari perhitungan analisis LQ yang secara rinci dijelaskan pada lampiran 31. Adapun data yang digunakan untuk memperoleh nilai LQ bersumber dari Nilai

PDRB 17 sektor pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
(Lampiran 1-29)

Tabel 5.2. Nilai *Location Quotation* Kabupaten /Kota di Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2017

No	Lapangan Usaha	Kabupaten											
		Kuantan Singingi	Indragiri Hulu	Indragiri Hilir	Pelalawan	Siak	Kampar	Rokan Hulu	Bengkalis	Rokan Hilir	Kep. Meranti	Pekanbaru	Dumai
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	B	B	B	B	NB	B	B	NB	B	B	NB	NB
2	Pertambangan dan Penggalian	NB	NB	NB	NB	B	B	NB	B	B	NB	NB	NB
3	Industri Pengolahan	B	B	NB	B	B	B	NB	NB	NB	NB	NB	B
4	Pengadaan Listrik dan Gas	NB	NB	NB	NB	NB	NB	B	NB	NB	NB	B	B
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	B	B	B	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	B	B
6	Konstruksi	NB	B	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	B	B
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	NB	B	B	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	B	B
8	Transportasi dan Pergudangan	NB	B	B	NB	NB	NB	NB	NB	NB	B	B	B
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	NB	B	B	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	B	B
10	Informasi dan Komunikasi	NB	NB	NB	NB	NB	NB	B	NB	NB	NB	B	B
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	NB	B	NB	NB	NB	NB	B	NB	NB	NB	B	B
12	Real Estate	NB	B	NB	NB	NB	B	NB	NB	NB	NB	B	NB
13	Jasa Perusahaan	NB	NB	NB	NB	B	NB	NB	NB	NB	NB	B	NB
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	B	NB	B	NB	NB	NB	B	NB	NB	B	B	B
15	Jasa Pendidikan	B	B	B	NB	NB	B	NB	NB	NB	NB	B	NB
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	NB	B	NB	NB	B	B	B	NB	NB	NB	B	NB
17	Jasa lainnya	NB	B	NB	NB	B	NB	B	NB	NB	NB	B	B

Sumber : Data Olahan PDRB Provinsi Riau Tahun 2017

Keterangan :

B : Sektor basis

NB : Sektor non basis

Sektor yang memiliki keunggulan komparatif selama kurun waktu 2010-2017 di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu adalah sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Pengadaan air, Pengolahan sampah, limbah dan daur ulang; Administrasi Pemerintahan, pertahanan, dan jaminan Sosial wajib; Jasa Pendidikan. Dari kelima sektor tersebut sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan memiliki nilai LQ tertinggi, dengan nilai LQ 2017 adalah sebesar 1,978 artinya sektor pertanian masih menjadi sektor yang unggul di Kabupaten Kuantan Singingi. Subsektor pertanian yang diunggulkan adalah subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, dan peternakan dan hasil-hasilnya. Dominasi sektor pertanian terlihat pada perannya pada PDRB yang mencapai lebih dari 50 persen selama periode 2010-2017.

Selama kurun waktu 2010-2017, sektor Jasa Perusahaan, pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Kuantan Singingi bukanlah sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Perannya terhadap PDRB juga masih relatif rendah yaitu 8 persen.

Pola seperti ini dapat mengindikasikan kabupaten Kuantan Singingi masih memiliki pola yang agraris, padahal menurut teori perubahan struktural, perekonomian suatu wilayah dikatakan berkembang atau maju jika adanya pola perubahan perekonomian dari agraris ke perekonomian industri. Walaupun begitu, pada kabupaten Kuantan Singingi terlihat adanya perkembangan sektor tersier yang berkembang, hal ini dikarenakan terdapat dua sektor yang selama kurun waktu 2010-2017 memiliki nilai $LQ > 1$ artinya kedua sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif, kedua sektor tersebut adalah sektor Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa-Jasa serta Sektor Jasa-Jasa. Untuk subsektornya dari sektor

tersier terdapat dua subsektor yang dapat dijadikan subsektor unggulan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sewa bangunan dan jasa-jasa pemerintahan umum.

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki iklim tropis basah. Walaupun memiliki trend nilai LQ yang cenderung menurun, namun sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan masih dapat dikatakan sebagai sektor yang paling potensial dibandingkan sektor lainnya dikabupaten Indragiri Hulu. Dengan nilai LQ yang mencapai 1,184, Subsektor pertanian yang memiliki keunggulan komparatif dan dapat dijadikan subsektor unggulan yaitu subsektor kehutanan. Hasil hutan yang banyak dihasilkan adalah berbagai jenis kayu seperti Meranti, Ramin, Kulim, Kruing, dan sebagainya. Komoditas ini telah diusahakan secara komersial oleh berbagai perusahaan nasional maupun oleh perusahaan asing, Perannya terhadap PDRB selama 2010-2017 rata-rata mencapai lebih dari 43 persen.

Selain sektor pertanian, sektor industri pengolahan juga memiliki keunggulan komparatif dengan rata-rata nilai LQ selama kurun waktu 2010-2017 diatas angka 1. Artinya kabupaten Indragiri Hulu sudah merupakan wilayah yang maju dimana kabuapten tersebut sudah menuju ke struktur perekonomian yang modern yakni dari pola ekonomi agraris ke perekonomian industri serta perubahan jenis permintaan konsumen dari produk kebutuhan pokok dan pangan ke berbagai barang dan jasa manufaktur. Sektor industri pengolahan juga merupakan salah satu industri yang memiliki kontribusi cukup besar dalam penciptaan nilai tambah PDRB di Indragiri Hulu. Pada tahun 2017, industri pengolahan menyumbang

sebesar 26,45 persen dalam distribusi persentase PDRB Kabupaten Indragiri Hulu.

Sektor lain yang juga memiliki keunggulan adalah sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran untuk semua subsektornya, sektor pengangkutan dan komunikasi untuk subsektor pengangkutan, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan subsektor lembaga keuangan tanpa bank dan sewa bangunan, dan sektor jasa-jasa subsektor pemerintahan umum. Kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PDRB belum terlalu tinggi dengan total mencapai 35,19 persen pada tahun 2017. Peran terkecil diberikan sektor listrik, gas, dan air bersih yang hanya mencapai kisaran 0,22 persen dari total PDRB.

Sektor pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir selama kurun waktu 2010-2017 memiliki nilai LQ yang cenderung menurun, namun sektor ini masih menjadi sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini dikarenakan sektor pertanian secara rata-rata selama kurun waktu tersebut masih memiliki nilai yang hampir mencapai angka 2. Subsektor dari sektor pertanian yang dapat dikembangkan oleh investor antara lain pada subsektor tanaman bahan makanan; subsektor tanaman perkebunan dan subsektor perikanan. Hal ini dikarenakan ketiga subsektor tersebut merupakan sektor basis atau sektor yang memiliki keunggulan komparatif selama kurun waktu 2010-2017. Rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB selama 2010-2017 mencapai 46,93 persen.

Secara umum baik sektor sekunder maupun sektor tersier di kabupaten Indragiri Hilir merupakan sektor yang memiliki keunggulan komparatif, artinya kabupaten Indragiri Hilir sudah menuju daerah yang maju karena adanya perubahan

pola permintaan konsumen dari produk kebutuhan pokok dan pangan ke berbagai barang dan jasa manufaktur dan jasa-jasa. Subsektor lain yang memiliki keunggulan komparatif atau menjadi subsektor basis di kabupaten Indragiri Hilir adalah subsektor industri tanpa migas; subsektor air bersih; subsektor perdagangan besar dan eceran; subsektor pengangkutan; subsektor komunikasi; subsektor lembaga keuangan tanpa bank; subsektor sewa bangunan serta subsektor pemerintahan umum.

Kabupaten Pelalawan merupakan kabupaten yang baru dimekarkan dalam Provinsi Riau. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di kabupaten Pelalawan, walaupun selama kurun waktu 2010-2017 terus memiliki trend cenderung menurun. Hal ini menunjukkan sektor pertanian di kabupaten Pelalawan telah mampu mencukupi kebutuhan dalam wilayah ini dan mempunyai kemampuan untuk dijadikan komoditas ekspor ke luar wilayah. Pengembangan sektor pertanian di kabupaten Pelalawan dapat melalui pengembangan subsektornya, dimana subsektor dari sektor pertanian yang memiliki keunggulan komparatif adalah subsektor Kehutanan. Hal ini cukup dimaklumi karena kabupaten Pelalawan memiliki areal yang paling luas yaitu 424.456,69 hektar atau 28,91 persen dari total luas keseturuhan wilayahnya. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Pelalawan selama 2010-2017 rata-rata mencapai 51 ,66 persen.

Selain sektor pertanian, sektor industri pengolahan juga merupakan sektor unggulan di Kabupaten Pelalawan, dimana selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2017 nilai LQ dari sektor ini selalu berada diatas angka 1, artinya sektor ini mempunyai keunggulan untuk dapat mengekspor komoditinya ke daerah lainnya. Berkembangan sektor industri pengolahan menunjukkan sudah

berkembangnya kabupaten ini menjadi daerah yang maju dimana pola permintaan barang sudah bergeser dari produk kebutuhan pokok dan pangan ke berbagai barang dan jasa manufaktur. Keberadaan industri pengolahan di daerah ini menjadi penggerak aktifitas ekonomi lainnya, tercermin oleh sumbangan yang cukup tinggi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pelalawan yang mencapai 29,33 persen pada tahun 2017 atau rata-rata mencapai 28,15 persen selama 2010-2017. Keberadaan industri kertas di Kabupaten Pelalawan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat secara signifikan.

Kabupaten Siak dahulunya merupakan salah satu kecamatan pada Kabupaten Bengkalis namun pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak. Berbeda dengan kabupaten/Kota lainnya yang memiliki beberapa sektor unggulan selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2017, Kabupaten Siak hanya memiliki satu sektor saja yang unggul, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, dengan subsektor yang memiliki keunggulan komparatif adalah minyak dan gas bumi. Dari hasil migas ini, Kabupaten Siak menjadi salah satu enam kabupaten terkaya di Indonesia, dengan PDB per kapita RPI 56,35 juta. Tidak ada perusahaan yang menonjol di daerah tersebut, meski potensi unggulan daerah ini adalah sektor pertambangan minyak bumi. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertambangan minyak juga terlihat pada kontribusinya terhadap PDRB yang mencapai 72,25 persen pada tahun 2010 atau rata-rata mencapai 77,41 persen selama 2010-2017. Tingginya penerimaan dari dana bagi hasil sehamnya bisa digunakan untuk mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang lain dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya. Sehingga ketergantungan terhadap minyak sedikit demi

sedikit bisa dikurangi mempunyai sumber penerimaan asli daerah yang bisa ditingkatkan.

Selain sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan jasa perusahaan dan jasa kesehatan dan kegiatan Sosial juga memiliki keunggulan selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2017 dengan subsektor yang dapat dikembangkan adalah industri tanpa migas. Di kabupaten Siak komoditas yang dapat dikembangkan adalah komoditi kertas dan barang dari kertas dimana potensi komoditas tersebut sangat besar untuk dijadikan komoditas unggulan. Selain itu sektor industri pengolahan yang berkembang menjadi sektor yang memiliki keunggulan komparatif mengindikasikan daerah ini sudah menuju kearah perekonomian yang maju.

Selama kurun waktu 2010-2017 pekonomian kabupaten Kampar disokong oleh sektor-sektor primer yaitu sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian. Analisis LQ menunjukkan kedua sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif dibanding ketujuh sektor lainnya, artinya kedua sektor tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kampar maupun kebutuhan daerah lainnya. Dari kedua sektor yang memiliki keunggulan komparatif tersebut, sektor pertanian dapat dikatakan sebagai sektor yang potensial atau unggul selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2017 dengan subsektor yang dapat dikembangkan adalah subsektor tanaman bahan makanan; subsektor tanaman perkebunan serta subsektor peternakan dan hasil-hasilnya. Sedangkan subsektor yang dapat dikembangkan dari sektor pertambangan dan penggalian adalah subsektor penggalian. Komoditas yang dapat dikembangkan dari subsektor penggalian adalah komoditas yang berkaitan dengan bahan

bangunan seperti pasir kuarsa, kerikil, tanah timbunan, dan batuan alam lainnya. Kedua sektor unggulan ini rata-rata mempunyai kontribusi terhadap PDRB sebesar lebih dari 80 persen, yaitu 53,64 persen untuk sektor pertambangan dan penggalian dan 28,49 persen untuk sektor pertanian.

Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 2010-2017, perekonomiannya masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki nilai LQ terbesar dibandingkan sektor lainnya yakni mencapai 2,25. Sangat disayangkan pada kabupaten ini terjadi penurunan jumlah sektor yang memiliki keunggulan komparatif, dimana selain sektor pertanian hanya terdapat empat sektor lainnya yang memiliki keunggulan komparatif yaitu Pengadaan Listrik; Informasi dan komunikasi; Jasa keuangan dan asuransi; administrasi pemerintahan pertahana dan jaminas sosial wajib; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. Jika melihat berdasarkan subsektornya, subsektor yang memiliki keunggulan komparatif antara lain adalah subsektor tanaman bahan makanan; subsektor tanaman perkebunan; subsektor peternakan dan hasil-hasilnya; subsektor penggalian, subsektor industri tanpa migas; subsektor air bersih; subsektor bangunan; subsektor restoran; subsektor pengangkutan; subsektor sewa bangunan serta subsektor pemerintahan umum. Sektor pertanian sebagai sektor unggulan memberikan terhadap PDRB pada tahun 2017 sebesar 52,66 persen atau rata-rata mencapai 52,95 persen selama periode 2010-2017. Kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 18,51 persen atau rata-rata mencapai 18,24 persen. Sedangkan tiga sektor unggulan lain 15,50 persen pada tahun 2017. Hal ini juga memberikan kontribusi mengindikasikan bahwa perekonomian kabupaten Rokan

Hulu masih dalam tahap awal untuk beralih dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Sektor unggulan di kabupaten Bengkalis selama periode 2010-2017 adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai LQ 2,581, sedangkan ke enam belas sektor lainnya merupakan sektor non basis. Artinya Kabupaten Bengkalis masih belum dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri, sehingga memungkinkan daerah Bengkalis untuk melakukan impor atau mendatangkan akan kebutuhan yang berasal dari ke delapan sektor tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Bengkalis lebih banyak mengandalkan sektor primer dalam menggerakkan perekonomiannya dan belum mampu mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang lainnya. Ketergantungan pada satu sektor yaitu pertambangan dan penggalian subsektor migas juga terlihat pada tingginya kontribusi sektor ini pada PDRB yang mencapai 84,85 persen pada tahun 2017 atau rata-rata mencapai 85,09 persen selama periode 2010-2017.

Selama kurun waktu 2010-2017, sektor yang menjadi primadona di Kabupaten Rokan Hilir adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan subsektor unggulannya adalah sektor Minyak dan Gas Bumi. Kinerja sektor pertambangan dan penggalian cukup baik dimana nilai LQ yang dimiliki oleh sektor ini terus memiliki trend yang meningkat, sehingga dapat dikatakan sektor yang mendorong atau menyokong perekonomian kabupaten Rokan Hilir adalah sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB mencapai 64,03 persen pada tahun 2017 atau rata-rata mencapai 68,08 persen selama periode 2010-2017. Seperti halnya kabupaten lain yang mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian terutama migas, kabupaten inipun belum

mampu memanfaatkan sektor migas untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lain. Akibatnya, meskipun pendapatan per kapita masyarakat tinggi, pertumbuhan ekonomi kabupaten ini tergolong rendah.

Kinerja sektor pertanian menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, dimana mulai tahun 2010 sampai dengan 2017 sektor tersebut sudah menjadi sektor basis atau sektor yang memiliki keunggulan komparatif di kabupaten Rokan Hilir. Keunggulan komparatif yang dimiliki oleh sektor pertanian di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan sektor ini sudah dapat memenuhi kebutuhan akan permintaan barang di daerahnya, selain itu sektor pertanian juga sudah dapat melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan daerah lainnya. Kontribusi sektor ini terus mengalami kenaikan dari 16,15 persen pada tahun 2010 menjadi 19,23 per-sen pada tahun 2017 atau rata-rata mencapai 17,47 persen.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten di Provinsi Riau yang pada awalnya adalah bagian dari Kabupaten Bengkalis. Selama kurun waktu 2011-2013 terdapat dua sektor yang memiliki keunggulan komparatif yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada dasarnya sektor lain di kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan kinerja LQ yang semakin meningkat walaupun nilai LQ dari semua sektor tersebut masih kurang dari 1. Hal ini cukup wajar mengingat kabupaten ini masih baru berdiri di tahun 2013. Dari kedua sektor yang memiliki keunggulan komparatif tersebut, sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang dapat dijadikan unggulan di kabupaten Kepulauan Meranti, dengan subsektor unggulannya adalah subsektor perdagangan besar dan eceran. Kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran mencapai 20,05 persen pada tahun 2017 naik dari 15,30 persen pada tahun 2011 atau rata-

rata mencapai 17,22 persen- Sedangkan sektor pertanian mempunyai kontribusi naik dari 20,24 persen menjadi 23,57 persen atau dengan rata-rata 21 persen pada periode yang sama.

Sebenarnya sektor pertambangan dan penggalian mempunyai kontribusi yang lebih tinggi dibanding kedua sektor unggulan ini, yaitu 47,17 persen pada tahun 2010 turun menjadi 33,61 persen pada tahun 2017 atau dengan rata-rata 41,83 persen. Tetapi sektor ini tidak menjadi sektor unggulan relatif jika dibandingkan sektor pertambangan dan penggalian di tingkat provinsi.

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota provinsi Riau, dimana selama kurun waktu 2010-2017 sektor yang berkembang atau sektor yang memiliki keunggulan komparatif antara lain sektor yang tergolong kedalam sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif tersebut antara lain adalah sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa serta sektor jasa-jasa. Dari kesemua sektor tersebut, sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor primadona. Hasil ini menunjukkan bahwa kota Pekanbaru sudah menjadi kota modern yang mengandalkan sektor tertier sebagai sektor penggerak ekonomi. Sebagai ibukota dan sebagai pintu masuk propinsi Riau, kota ini memang memberikan keleluasaan untuk berkembangnya sektor jasa. Kontribusi sektor jasa-jasa ini rata-rata mencapai 88 persen dari PDRB selama periode 2010-2017. Sisanya adalah peran sektor primer dan sekunder.

Selama kurun waktu 2010-2017, subsektor pengolahan tidak lagi menjadi subsektor basis atau subsektor yang memiliki keunggulan komparatif dimana

selama kurun waktu tersebut sektor pengolahan memiliki trend nilai LQ yang semakin menurun sampai pada tahun 2010-2017 nilai $LQ < 1$. Artinya sektor pengolahan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan daerahnya bahkan cenderung membutuhkan daerah lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Sama halnya dengan Kota Pekanbaru, di Kota Dumai selama kurun waktu 2010-2017, sektor yang berkembang atau sektor yang memiliki keunggulan komparatif antara lain sektor yang tergolong ke dalam sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif tersebut antara lain adalah industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa serta sektor jasa-jasa. Dari kesemua sektor tersebut, sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor primadona atau sektor paling unggul karena memiliki nilai dan nilai $LQ > 1$ dan nilai LQ terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya (3,499), dengan subsektor unggulannya dari sektor tersebut adalah subsektor industri migas. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB mencapai 53,99 persen pada tahun 2010 dan turun menjadi 46,67 persen pada tahun 2017 atau rata-rata mencapai 50,85 persen. Sedangkan kontribusi sektor tertier (jasa-jasa) mencapai 49,06 persen pada tahun 2017 naik dari 41,68 persen pada tahun 2010 atau rata-rata mencapai 44,89 persen selama 2010-2017.

5.3 Analisis Data

5.3.1 Analisis Tipologi Klassen

Dari hasil analisis Tipologi Klassen menggunakan pendekatan wilayah yang didasarkan atas besarnya laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan perkapita di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2017 di dapatkan hasil pengklasifikasian sebagai berikut:

1. Kuadran I : Kabupaten/kota yang cepat maju dan cepat tumbuh

Dari tahun 2010-2017 hanya Kabupaten Bengkalis memiliki sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor yang maju dan tumbuh pesat (masuk dalam kuadran I). Dari Sembilan sektor ekonomi menurut lapangan usaha di 12 kabupaten/kota di Propinsi Riau pada umumnya memiliki sektor ekonomi pada kuadran III atau sektor yang berarti masih dapat berkembang/berpotensi dan tidak sedikit pula sektor ekonomi dalam kabupaten/kota di Provinsi riau tergolong dalam sektor yang relatif tertinggal.

2. Kuadran II : Kabupaten/kota yang maju tapi tertekan

Selama periode 2010-2017, terdapat 2 kabupaten/kota yang berada pada kuadran II termasuk daerah maju tapi tertekan. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir karena penduduknya mempunyai pertumbuhan pendapatan per kapita yang tinggi tetapi tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonominya. Kedua kabupaten ini juga menumpukan pertumbuhan ekonominya pada sektor pertambangan subsektor minyak bumi dan gas.

3. Kuadran III : Kabupaten/kota yang berkembang cepat

Selama periode 2010-2017, terdapat 6 kabupaten/kota yang berada pada kuadran III termasuk daerah yang berkembang cepat. Kabupaten/kota tersebut adalah Pekanbaru, Kuantan Singingi, Indragiri Hiiir, Pelalawan, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, semuanya mengandalkan sektor pertanian. Tingginya pertumbuhan

yang ditopang sektor pertanian ternyata belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Harga jual produk pertanian tidak stabil. Saat panen melimpah harga jual produk cenderung mengalami penurunan. Subsektor perkebunan tentama kelapa sawit menjadi andalan di Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, dan Rokan Hulu. Sedangkan subsektor kehutanan menjadi pendorong pertumbuhan di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu. Sedangkan Pekanbaru mengandalkan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

4. Kuadran IV : Kabupaten/kota yang relatif tertinggal

Pada tahun 2010 terdapat 2 kabupaten/kota yang berada pada kuadran IV termasuk daerah yang relatif tertinggal. Kabupaten/kota tersebut adalah Dumai dan Kampar. Pada tahun 2012 daerah yang relatif tertinggal adalah Kampar. Pada tahun 2013 daerah yang relatif tertinggal adalah Kampar dan Dumai. Pada tahun 2014 daerah yang relatif tertinggal adalah Dumai dan Kepulauan Meranti sedangkan pada tahun 2017 daerah yang relatif tertinggal adalah Kampar dan Kepulauan Meranti. Dengan demikian, Kabupaten Kampar dan Kota Dumai selama 2010-2017 mengalami pergeseran kuadran dari daerah berkembang ke daerah relatif tertinggal atau sebaliknya dengan pertumbuhan pendapatan per kapita rendah, pertumbuhan ekonomi bergeser dari pertumbuhan ekonomi rendah ke pertumbuhan ekonomi tinggi dan sebaliknya. Kabupaten Kampar sebenarnya mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian, terutama penggalian sebagai sektor andalan. Mayoritas penggalian yang ada adalah galian C. Dan ternyata sektor ini belum mampu memberikan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat pada khususnya dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya.

5.3.2 Analisis LQ

Berdasarkan analisis LQ di tiap Kabupaten / Kota Provinsi Riau dalam periode waktu tahun 2010-2017. Terdapat 17 sub sektor ekonomi yang diidentifikasi dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau diketahui bahwa sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor unggulan di Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Dumai. Sektor pertanian menjadi unggulan di Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Kepulauan Meranti. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi menjadi sektor unggulan di Kota pekanbaru. Sektor-sektor ini diharapkan dapat dapat memenuhi kebutuhan dalam maupun luar daerah. Pengembangan kabupaten/kota di Provinsi Riau selanjutnya diarahkan untuk lebih meningkatkan keterkaitan antar daerah.

5.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yakni Analisis Tipologi kelas dan Analisis LQ terhadap karakteristik pembangunan ekonomi daerah provinsi Riau, dapatlah disajikan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Berdasar hasil Tipologi Klassen, pada tahun 2017, Bengkalis masuk kategori daerah yang cepat maju. Siak dan Rokan Hilir termasuk daerah maju tapi tertekan karena tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita tumbuh tinggi tetapi perlumbuan ekonominya masih rendah. Sebaliknya Pekanbaru, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Dumai yang mempunyai pertumbuhan ekonomi relatif tinggi tetapi pertumbuhan pendapatan per kapitanya masih rendah sehingga termasuk dalam kategori daerah yang

berkembang cepat. Sedangkan Kampar dan Kepulauan Meranti tergolong daerah yang relatif tertinggal karena pertumbuhan ekonominya dan pendapatan per kapitanya masih rendah.

Hasil penelitian LQ menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi potensial di seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor unggulan di Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Dumai. Sektor pertanian menjadi unggulan di Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Kepulauan Meranti- Sedangkan Kota Pekanbaru lebih mengandalkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor-sektor ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam maupun luar daerah. Pengembangan kabupaten/kota di Provinsi Riau selanjutnya diarahkan untuk lebih meningkatkan keterkaitan antar daerah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasar hasil Tipologi Klassen, Kabupaten Siak, Bengkalis dan Rokan Hilir termasuk masuk kategori daerah tertekan dengan Pendapatan Perkapita Tinggi namun Laju Pertumbuhan rendah. Sebaliknya Kota Pekanbaru, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hulu tergolong daerah berkembang dengan pendapatan perkapita rendah namun laju pertumbuhan tinggi. Kota Dumai dan Kabupaten Kampar termasuk kedalam kuadran yang sama yaitu daerah dengan laju pertumbuhan yang rendah dan pendapatan perkapita rendah.
2. Hasil penelitian LQ menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi potensial di seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sektor pertambangan dan penggalan menjadi sektor unggulan di Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Dumai. Sektor pertanian menjadi unggulan di Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Kepulauan Meranti. Sedangkan Kota Pekanbaru lebih mengandalkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor-sektor ini diharapkan dapat dapat memenuhi

kebutuhan dalam maupun luar daerah. Pengembangan kabupaten/kota di Provinsi Riau selanjutnya diarahkan untuk lebih meningkatkan keterkaitan antar daerah.

6.2 Saran

Selain kesimpulan di atas penulis juga mengajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah provinsi diharapkan memprioritaskan kebijakan pembangunan pada daerah yang relatif tertinggal pada kuadran 4 tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat pada kuadran I.
2. Bagi pemerintah daerah yang bersektor basis pada sektor pertanian, untuk mengangkat dan mengembangkan sektor pertanian ini agar memiliki kontribusi lebih besar dalam perekonomian provinsi Riau.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar meneruskan dan lebih memaksimalkan lagi penelitian yang seperti ini sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik dalam bidang ekonomi, terutama dalam bidang ekonomi pembangunan.
4. Dalam penelitian ini pastinya, masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi selama penelitian, oleh karena itu diharapkan masukan-masukan sehingga menjadi bahan evaluasi bagi penulis kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi VI), Rineka Cipta. Jakarta.

Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu Jakarta

Anwar, A. 2005. *Kelimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan: Tinjauan Kritis*. P4Wpress. Bogor.

Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kedua. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta

Blakely, EJ. 1989. *Planning Local Economic Development Theory and Practice* SAGE Publications.

Bond, R., J. Curran, K. Patrick, N. Lece and P. Francis. 2001. *Integrated Impact Assessment for Sustainable Development. A Case Study Approach* University of Manchester. UK.

BPS Provinsi Riau. 2010. *Riau Dalam Angka 2010*. Pekanbaru

BPS Provinsi Riau. 2011. *Riau Dalam Angka 2011*, Pekanbaru

BPS Provinsi Riau. 2012. *Riau Dalam Angka 2012*. Pekanbaru

BPS Provinsi Riau. 2013. *Riau Dalam Angka 2013*. Pekanbaru

BPS Provinsi Riau. 2014. *Riau Dalam Angka 2014*. Pekanbaru

BPS Provinsi Riau. 2015. *Riau Dalam Angka 2015*. Pekanbaru

BPS Provinsi Riau. 2016. *Riau Dalam Angka 2016*. Pekanbaru

BPS Provinsi Riau. 2017. Riau Dalam Angka 2017. Pekanbaru

Chumaidatul Miroah. 2015. Analisis Penentuan Sektor Unggulan Kota Semarang Melalui Pendekaian Tipologi Klassen Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

Dini Sapta Wulan Fatmasari, 2007. Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tangerang (Pendekatan Model Basis Ekonomi).Universitas Negeri Semarang.

Hasani, Akrom. 2010. Analisis strukuir Perekonomian Berdasarkan Pendekaran 2008 shift share di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2003 (sh•ipsi). Universitas Diponegoro. Semarang

Hirschman. 1958. The Strategy of Ekonomic Development. Yale University Pxxs. New Haven. Iskandar. 2008. Melode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Gaung Persada Press. Jakarta.

Khusaini, Muhamad. 2006. Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah Malang. Ekonomi Publik. BPFE. Universitas Brawijaya.

Mutiam Ekasari. 2011. Perencanaan Pengembangan Sektor Pertanian dalam Upaya Peningkatan Pereknnomian Kabupaten Temanggung.

Riml Endi, I Wayan Suparta, Muhammad Husaini. Analisis Seüor Unggulan Dan Pengembangan Wilayah Di Kota Bandar Lampung 2000-2012. JEP-Vol- 4, NO 1, April 2015 107

Saifan. 2011. Dampak Pemekaran Wilayah Administrasi Pemerintahan bagi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Safi'i. 2007. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah (Perspektif Teoritik). Averroes. Malang.

Sirojunlam. 2010- Regional: Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi. USU Press, Medan.

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Afabeta. Bandung.

Sukirno, Sadono, 1985. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. LPE-UI. Jakarta.

Sulistiono. 2006. Model Pengembangan Wilayah Dengan Pendekatan Agropolitan (Studi Kasus Kabupaten Banyumas). Tesis Progam Pascasariana IPB. Bogor

Syafrizai. 2008. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Baduose Media. Padang

Tarigan, R. 2005. Ekonomi Regional. Bumi Aksara. Jakarta.

Usman, Husaini. 2009. Metodologi Penelitian Social. Edisi Kedua. Bumi Aksara.
Jakarta

Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan Yogyakarta. UPP STIM YKPN
Aplikui Komputer.

